JEBA: JURNAL EKONOMI, BISNIS, DAN AKUNTANSI
Vol 28, No. 3, 2026, pp. 26-40
Available online: https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jeba/

Akuntabilitas Fiskal dalam Kebijakan Pajak dan Subsidi: Studi Literatur tentang Implikasinya terhadap Surplus Konsumen dan Produsen

Muhammad Faza Fauzan Adziima [*1], Sarpini [2]
Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
* Corresponding Author. Email: mfaza.fauzan2007@gmail.com

Abstrak: Kebijakan pajak dan subsidi merupakan instrumen fiskal yang berperan dalam memengaruhi harga, aktivitas produksi, konsumsi, serta distribusi kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya memerlukan akuntabilitas fiskal agar manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan biaya anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mekanisme akuntabilitas fiskal dalam kebijakan pajak dan subsidi, menganalisis implikasinya terhadap harga serta distribusi surplus konsumen dan produsen, dan menjelaskan peran transparansi, pengawasan, serta evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap artikel ilmiah periode 2021–2026 yang relevan dan dapat diakses secara terbuka. Data dianalisis melalui sintesis naratif dan tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan mekanisme akuntabilitas, dampak kebijakan terhadap pasar, serta evaluasi kesejahteraan dan biaya fiskal. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pajak dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi berpotensi menambah beban konsumen atau produsen, sedangkan subsidi dapat memperluas manfaat ekonomi, meskipun distribusinya bergantung pada struktur pasar dan ketepatan sasaran. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi, pengawasan, dan evaluasi berkala diperlukan untuk memperkuat efektivitas serta keadilan kebijakan fiskal. Pemerintah direkomendasikan mengukur manfaat sosial dan ekonomi secara terintegrasi dengan biaya fiskalnya.
Kata Kunci: akuntabilitas fiskal; kebijakan pajak; subsidi; surplus konsumen; surplus produsen

Fiscal Accountability in Tax and Subsidy Policies: A Literature Review of Their Implications for Consumer and Producer Surplus

***Abstract**: Tax and subsidy policies are fiscal instruments that influence prices, production, consumption, and the distribution of welfare, so their implementation requires fiscal accountability to ensure that economic benefits are proportionate to budgetary costs and can be justified to the public. This study aims to identify fiscal accountability mechanisms in tax and subsidy policies, analyze their implications for prices and the distribution of consumer surplus and producer surplus, and explain the roles of transparency, oversight, and evaluation in assessing policy effectiveness. The study is a literature review with a descriptive qualitative approach, drawing on open-access scholarly articles published between 2021 and 2026 that were selected through a structured search guided by PRISMA 2020. Twenty-five articles were analyzed using narrative and thematic synthesis. The synthesis indicates that taxation can increase government revenue but may impose additional burdens on consumers or producers, whereas subsidies can expand economic benefits, although their distribution depends on market structure and targeting accuracy. These findings are a cross-article synthesis rather than a direct measurement of changes in consumer and producer surplus, because only some of the articles analyze surplus or market welfare explicitly. Transparency, oversight with follow-up, and periodic evaluation are necessary to strengthen the effectiveness and fairness of fiscal policy. Governments are recommended to assess social and economic benefits together with fiscal costs in an integrated manner.*
***Keywords**: consumer surplus; fiscal accountability; producer surplus; subsidies; tax policy*

PENDAHULUAN

Pajak dan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi aktivitas ekonomi, mengatur perilaku pasar, dan mencapai tujuan kesejahteraan. Pajak

memengaruhi harga barang, biaya produksi, konsumsi, dan keputusan investasi, sedangkan subsidi menurunkan biaya yang ditanggung produsen atau harga yang dibayar konsumen. Konsekuensinya berbeda bagi setiap kelompok: kebijakan yang menguntungkan konsumen belum tentu meningkatkan keuntungan produsen, dan subsidi yang mendukung produsen belum tentu sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Keberhasilan kebijakan fiskal karena itu tidak cukup dinilai dari besarnya penerimaan pajak atau anggaran subsidi, tetapi juga dari pertanggungjawaban penggunaan dana publik, distribusi manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Di sinilah akuntabilitas fiskal menjadi penting, yakni memastikan bahwa kebijakan pajak dan subsidi dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan tujuan yang jelas serta bukti yang dapat diperiksa.

Tuntutan tersebut juga tertanam dalam kerangka hukum Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara mengamanatkan pengelolaan keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003), sedangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi badan publik (Republik Indonesia, 2008). Dalam praktik, tantangan akuntabilitas terlihat pada subsidi dan penerimaan pajak. Gobel *et al.* (2024) menemukan bahwa subsidi energi berbasis komoditas dapat lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu, dan Sumarno *et al.* (2022) mengidentifikasi bahwa subsidi bahan bakar fosil dapat menghambat transisi energi Indonesia. Pada sisi penerimaan, Indrawati *et al.* (2024) menekankan perlunya peninjauan insentif dan pengecualian pajak serta reformasi subsidi energi setelah pandemi.

Secara konseptual, akuntabilitas dipahami sebagai hubungan ketika pelaku berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada suatu forum, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menilai, dan pelaku dapat menanggung konsekuensi (Bovens, 2007). Dalam bidang fiskal, hubungan ini bertumpu pada transparansi, yaitu keterbukaan kepada publik mengenai struktur dan fungsi pemerintah, maksud kebijakan fiskal, akun sektor publik, dan proyeksi fiskal (Kopits & Craig, 1998). Bukti empiris menunjukkan nilai penting transparansi tersebut: Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2022) menganalisis 110 negara dan menemukan bahwa transparansi anggaran berhubungan positif dengan keberlanjutan keuangan pemerintah. Namun, keterbukaan informasi belum tentu menghasilkan keterlibatan masyarakat. Brunnschweiler *et al.* (2025) menemukan bahwa masyarakat Bojonegoro yang disurvei masih memiliki informasi terbatas mengenai pengelolaan pendapatan sumber daya alam meskipun kebijakan transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan. Akuntabilitas fiskal karena itu memerlukan informasi yang mudah dipahami, mekanisme pengawasan yang dapat diakses, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan lazim dianalisis dengan konsep surplus konsumen, yaitu selisih antara kesediaan konsumen membayar dan harga yang dibayarkan, serta surplus produsen, yaitu selisih antara penerimaan penjualan dan biaya minimum untuk menyediakan barang (Stiglitz & Rosengard, 2015). Pajak yang mengubah harga dan jumlah transaksi menimbulkan kerugian bobot mati (*deadweight loss*) karena sebagian surplus hilang tanpa menjadi penerimaan pemerintah (Harberger, 1964). Pihak yang menanggung beban ekonomi pajak ditentukan oleh seberapa besar pajak diteruskan ke harga (*pass-through*), yang bergantung pada karakteristik permintaan, biaya produksi, dan struktur persaingan sehingga pihak yang secara hukum membayar pajak belum tentu menanggung seluruh bebannya (Weyl & Fabinger, 2013; Adachi & Fabinger, 2022). Logika serupa berlaku pada subsidi: Fan dan Zhang (2022) menunjukkan bahwa subsidi konsumen dapat mendorong perusahaan menaikkan harga sehingga sebagian manfaat subsidi berpindah kepada produsen. Penilaian kesejahteraan dengan demikian memerlukan perubahan surplus konsumen dan surplus produsen yang dibandingkan dengan biaya atau penerimaan bersih pemerintah. Informasi inilah yang dibutuhkan akuntabilitas fiskal agar pertanyaan siapa menanggung biaya dan siapa menerima manfaat dapat dijawab dengan bukti.

Literatur periode 2021–2026 yang relevan dapat dikelompokkan menjadi tiga arus. Pertama, kajian tata kelola menekankan transparansi, pengawasan, dan evaluasi. Gootjes dan de Haan (2022) menemukan bahwa aturan fiskal kurang efektif memperbaiki keseimbangan anggaran ketika transparansi rendah; Tambunan dan Kuncoro (2026) menemukan bahwa permintaan klarifikasi data dan/atau informasi (P2DK) berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak pada 259 Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan instrumen pengawasan lain tidak selalu efektif; dan Demidova *et al.* (2024) menyoroti sulitnya membandingkan pengeluaran perpajakan antarnegara karena perbedaan definisi, cakupan, dan ketersediaan data. Kedua, kajian insidensi dan kesejahteraan menelaah *pass-through* serta distribusi surplus (Adachi & Fabinger, 2022; Fan & Zhang, 2022), termasuk distribusi manfaat subsidi (Do & Le, 2023; Gobel *et al.*, 2024). Ketiga, kajian pemilihan instrumen membandingkan pajak, subsidi, dan regulasi. Wiskich (2024) membandingkan pajak karbon dengan subsidi produksi bersih dan subsidi penelitian melalui model tiga sektor, sedangkan Ramani *et al.* (2024) membandingkan pajak, subsidi,

standar emisi, dan perdagangan emisi; keduanya menunjukkan bahwa tidak ada satu instrumen yang selalu terbaik pada semua kondisi.

Ketiga arus tersebut saling melengkapi, tetapi umumnya berjalan terpisah. Kajian tata kelola jarang mengaitkan akuntabilitas dengan perubahan surplus, sedangkan kajian insidensi dan surplus jarang menjelaskan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan hasilnya diuji publik. Celah penelitian yang diangkat bukan berarti hubungan tersebut belum pernah diteliti, melainkan bahwa temuan tata kelola, dampak pasar, dan distribusi kesejahteraan belum dihubungkan secara terstruktur dalam satu kerangka analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis literatur 2021–2026 yang mengintegrasikan tiga dimensi: (1) mekanisme akuntabilitas fiskal, yaitu keterbukaan informasi, kejelasan sasaran, pengawasan, dan evaluasi hasil; (2) dampak pajak dan subsidi terhadap mekanisme pasar, yaitu harga, insidensi beban pajak, dan distribusi subsidi; dan (3) implikasinya terhadap surplus konsumen, surplus produsen, dan biaya fiskal.

Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana literatur periode 2021–2026 menjelaskan peran akuntabilitas fiskal dalam kebijakan pajak dan subsidi serta implikasinya terhadap surplus konsumen dan surplus produsen. Secara khusus, penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi prinsip dan mekanisme akuntabilitas fiskal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pajak dan subsidi; (2) menganalisis pengaruh kedua instrumen terhadap harga, perilaku pasar, dan distribusi manfaat antara konsumen dan produsen; serta (3) menjelaskan peran transparansi, pengawasan, dan evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan beserta biaya fiskalnya. Secara teoretis, penelitian ini menghubungkan konsep akuntabilitas fiskal dengan insidensi pajak, distribusi subsidi, dan perubahan surplus. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merancang transparansi biaya kebijakan, memperbaiki ketepatan sasaran subsidi, mengevaluasi manfaat insentif pajak, dan memperkuat pengawasan atas hasil penggunaan anggaran publik. Implikasi yang dihasilkan tidak mengarah pada kenaikan atau penurunan pajak dan subsidi secara seragam, melainkan pada evaluasi setiap instrumen berdasarkan tujuan, biaya fiskal, dampak distribusi, dan kondisi pasar.

METODE

Penelitian berjudul "Akuntabilitas Fiskal dalam Kebijakan Pajak dan Subsidi: Studi Literatur tentang Implikasinya terhadap Surplus Konsumen dan Produsen" menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelusuran literatur secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara akuntabilitas fiskal, kebijakan pajak dan subsidi, serta perubahan surplus konsumen dan produsen. (Booth, Sutton and Papaioannou, 2016) dalam Systematic Approaches to a Successful Literature Review menjelaskan pentingnya perencanaan pencarian, penentuan cakupan, evaluasi kualitas sumber, dan sintesis temuan secara sistematis. (Gough, Oliver and Thomas, 2017) dalam An Introduction to Systematic Reviews juga menekankan bahwa tinjauan sistematis dapat digunakan untuk mengintegrasikan bukti penelitian sebagai dasar pengembangan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada publikasi ilmiah tahun 2021–2026 yang membahas transparansi fiskal, insidensi pajak, subsidi pemerintah, surplus konsumen, surplus produsen, dan kesejahteraan ekonomi.

Data penelitian berupa artikel jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris yang ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan portal penerbit jurnal yang menyediakan akses terbuka. Penelusuran menggunakan kata kunci "akuntabilitas fiskal", "kebijakan pajak", "subsidi pemerintah", "surplus konsumen", "surplus produsen", fiscal accountability, tax incidence, government subsidies, consumer surplus, dan producer surplus, yang dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND dan OR. Artikel dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, tahun publikasi, ketersediaan teks lengkap, dan kejelasan metode serta temuan. Artikel duplikat, tidak relevan, atau tidak memenuhi kriteria sumber dikeluarkan. Data yang terkumpul dicatat dalam lembar ekstraksi yang memuat penulis, tahun, tujuan, metode, hasil, dan implikasi penelitian. Proses pencarian dan seleksi didokumentasikan dengan mengacu pada prinsip pelaporan PRISMA 2020 dari (Page *et al.*, 2021) sedangkan jumlah artikel yang dianalisis ditentukan berdasarkan hasil seleksi actual.

Analisis data dilakukan melalui sintesis naratif dan analisis tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema, yaitu mekanisme akuntabilitas fiskal; pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga serta distribusi manfaat; dan implikasinya terhadap surplus konsumen, surplus produsen, serta kesejahteraan ekonomi. Setiap artikel dibandingkan berdasarkan pendekatan, konteks, hasil, dan keterbatasannya untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan penelitian. Hart (2018) menekankan pentingnya evaluasi kritis dan sintesis untuk membangun argumentasi ilmiah yang kuat.

This is an open access article under the CC–BY-SA licen

Keabsahan sintesis dijaga melalui pemeriksaan ulang informasi pada artikel asli dan pencatatan proses seleksi secara konsisten. Dengan demikian, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman terpadu mengenai bagaimana akuntabilitas fiskal dapat digunakan untuk menilai dampak kebijakan pajak dan subsidi terhadap surplus konsumen dan produsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses pencarian dan seleksi menghasilkan 25 artikel yang dirangkum pada Tabel 1 meliputi penulis, judul, metode, dan temuan utama setiap artikel yang diurutkan menurut tahun terbit.

Tabel 1. Hasil Penelaahan Literatur tentang Akuntabilitas Fiskal, Kebijakan Pajak dan Subsidi, serta Surplus

No.	Penulis dan tahun	Judul penelitian dan metode	Temuan utama yang relevan
1	Maestre-Andrés *et al*. (2021)	Carbon Tax Acceptability with Information Provision and Mixed Revenue Uses. Eksperimen survei mengenai penggunaan penerimaan pajak karbon.	Penggunaan penerimaan pajak untuk membiayai proyek lingkungan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pajak karbon. Kombinasi pembiayaan proyek lingkungan dan kompensasi rumah tangga berpendapatan rendah juga memperoleh dukungan. Persepsi keadilan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan masyarakat.
2	Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2022)	Budget Transparency and Financial Sustainability. Analisis ekonometrika terhadap 110 negara.	Transparansi anggaran ditemukan berhubungan positif dengan keberlanjutan keuangan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan fiskal tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan publik, tetapi juga relevan bagi kemampuan pemerintah menjaga kesehatan keuangannya dalam jangka panjang.
3	Gootjes dan de Haan (2022)	Do Fiscal Rules Need Budget Transparency to Be Effective?. Analisis data panel 73 negara.	Aturan fiskal tidak secara efektif memperbaiki keseimbangan anggaran ketika transparansi anggaran rendah. Efektivitas penyesuaian fiskal meningkat ketika keterbukaan anggaran mencapai tingkat yang memadai. Artinya, aturan formal membutuhkan informasi yang transparan agar pengendalian fiskal berjalan efektif.
4	Fan dan Zhang (2022)	The Welfare Effect of a Consumer Subsidy with Price Ceilings: The Case of Chinese Cell Phones. Analisis ekonomi terhadap subsidi konsumen dan batas harga.	Subsidi konsumen tidak selalu sepenuhnya menguntungkan konsumen karena perusahaan dapat menaikkan harga sehingga sebagian manfaat subsidi berpindah kepada produsen. Mengaitkan kelayakan subsidi dengan komitmen perusahaan terhadap batas harga dapat mengurangi kemungkinan kenaikan harga yang menggerus manfaat konsumen.
5	Adachi dan Fabinger (2022)	Pass-Through, Welfare, and Incidence under Imperfect Competition. Analisis teoretis mengenai penerusan pajak, insidensi, dan kesejahteraan dalam pasar tidak bersaing sempurna.	Dampak pajak terhadap konsumen dan produsen bergantung pada penerusan beban pajak ke harga dan karakteristik persaingan pasar. Penelitian ini menyediakan kerangka untuk menilai perubahan surplus konsumen dan produsen dibandingkan dengan perubahan biaya bersih pemerintah.
6	Wang *et al*. (2022)	Tax Incentives and Green Innovation—The Mediating Role of Financing Constraints and the Moderating Role of Subsidies. Analisis empiris perusahaan publik di Tiongkok.	Insentif pajak ditemukan mendorong inovasi hijau, terutama melalui pengurangan kendala pembiayaan. Subsidi tunai tidak selalu memberikan manfaat tambahan dan pada kondisi tertentu dapat melemahkan pengaruh positif insentif pajak. Temuan ini menekankan perlunya pengawasan penggunaan subsidi dan penilaian hasil kebijakan.

No.	Penulis dan tahun	Judul penelitian dan metode	Temuan utama yang relevan
7	Liu dan Zhang (2023)	A Study on the Effects of Tax Reduction Policies on Fiscal Sustainability in China. Analisis data panel 30 provinsi di Tiongkok pada 2009–2019.	Pengurangan pajak secara signifikan melemahkan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah dalam konteks penelitian. Pengaruh negatif tersebut lebih kuat di wilayah barat, daerah dengan proporsi sektor tersier yang lebih rendah, dan daerah dengan desentralisasi fiskal lebih tinggi. Temuan ini memperlihatkan perlunya mempertimbangkan kemampuan fiskal ketika merancang kebijakan pengurangan pajak.
8	Do dan Le (2023)	On the Welfare Effect of Retail Electricity Subsidy in Vietnam. Analisis insidensi manfaat subsidi listrik, transfer tunai, dan surplus konsumen.	Subsidi listrik berbasis tarif dan bantuan tunai yang ditelaah belum efektif dalam mendukung kelompok miskin sebagaimana diharapkan. Perbaikan rancangan memerlukan struktur harga yang lebih tepat serta evaluasi mengenai kelompok penerima manfaat. Temuan ini memperlihatkan bahwa subsidi yang menekan harga tidak otomatis menghasilkan distribusi kesejahteraan yang adil.
9	Nate *et al.* (2023)	Index of the Openness and Transparency of Budgeting and Financial Management of the Defence and Security Sector: Case of Ukraine. Pengembangan indeks dan analisis data keterbukaan anggaran Ukraina pada 2008–2021.	Penelitian mengembangkan indeks untuk mengukur keterbukaan anggaran dan pengelolaan keuangan sektor pertahanan. Hasil pengukuran menunjukkan kecenderungan peningkatan transparansi selama periode penelitian, tetapi keterlambatan publikasi dan ketidakteraturan audit masih menjadi kendala. Temuan ini menunjukkan perlunya indikator keterbukaan dan mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan secara konsisten.
10	Gobel *et al.* (2024)	Equity and Efficiency: An Examination of Indonesia's Energy Subsidy Policy and Pathways to Inclusive Reform. Analisis dokumen, data rumah tangga, dan data sosial ekonomi Indonesia.	Subsidi energi berbasis harga ditemukan berpotensi lebih menguntungkan rumah tangga mampu daripada kelompok miskin dan rentan. Hambatan akses juga dialami kelompok tertentu, termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia berpendapatan rendah. Penelitian merekomendasikan pergeseran menuju subsidi rumah tangga secara langsung dan lebih tepat sasaran.
11	Indrawati *et al.* (2024)	Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. Kajian perkembangan kebijakan fiskal Indonesia setelah pandemi.	Pengendalian defisit membantu memperbaiki posisi fiskal Indonesia setelah pandemi, tetapi penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang tetap menjadi tantangan. Artikel ini menekankan perbaikan administrasi dan kebijakan pajak, peninjauan insentif serta pengecualian pajak, reformasi subsidi energi, dan peningkatan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.
12	Wiskich (2024)	A Carbon Tax versus Clean Subsidies: Optimal and Suboptimal Policies for the Clean Transition. Pemodelan ekonomi mengenai pajak karbon dan subsidi energi bersih.	Pajak karbon menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam sebagian besar kalibrasi model. Namun, ketika kebijakan optimal baru tercapai setelah 2050, subsidi riset teknologi bersih dapat lebih unggul pada kondisi tertentu. Kombinasi pajak karbon dan subsidi produksi energi bersih juga relevan apabila instrumen riset tidak tersedia.
13	Demidova *et al.* (2024)	An Assessment of the Effectiveness and Scale of Tax Expenditures to Support Investments and Priority Sectors in G20 Countries. Analisis belanja perpajakan di sembilan negara G20.	Kajian ini menilai skala dan efektivitas insentif pajak untuk investasi serta sektor prioritas. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada perlunya menilai insentif pajak berdasarkan tujuan, besaran, dan hasil ekonominya, bukan hanya berdasarkan jumlah fasilitas yang diberikan.
14	Rosyid *et al.* (2024)	The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. Studi kualitatif melalui kajian literatur dan analisis dokumen.	Digitalisasi administrasi melalui e-Filing dan e-Billing membantu meningkatkan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan dan mempermudah kepatuhan wajib pajak. Namun, keamanan data dan kesenjangan akses digital tetap perlu diperhatikan agar digitalisasi benar-benar memperkuat administrasi pajak.

This is an open access article under the CC–BY-SA licen

No.	Penulis dan tahun	Judul penelitian dan metode	Temuan utama yang relevan
15	Ramani *et al.* (2024)	Effectiveness of Environmental Regulations: Firm's Decisions and Welfare Implications. Pemodelan teori permainan yang membandingkan pajak, subsidi, standar emisi, dan perdagangan emisi.	Instrumen pajak dan subsidi dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan yang berbeda bergantung pada besarnya kerusakan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, pajak atau subsidi dapat menghasilkan kesejahteraan tertinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa rancangan kebijakan gabungan dapat menyelaraskan keputusan perusahaan dengan tujuan sosial.
16	Mohammadzadeh Valencia *et al.* (2024)	Public Support for Carbon Pricing Policies and Revenue Recycling Options: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Survey Literature. Tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 35 studi, 70 survei, dan lebih dari 100.000 responden di 26 negara.	Penggunaan kembali penerimaan pajak karbon meningkatkan dukungan publik secara umum. Dalam analisis meta-regresi, belanja hijau untuk proyek yang mendukung iklim merupakan pilihan penggunaan penerimaan yang berhubungan signifikan dengan peningkatan dukungan. Hasilnya menunjukkan bahwa penjelasan tentang penggunaan penerimaan pajak penting bagi penerimaan sosial atas kebijakan fiskal.
17	Döbbeling-Hildebrandt *et al.* (2024)	Systematic Review and Meta-Analysis of Ex-Post Evaluations on the Effectiveness of Carbon Pricing. Meta-analisis terhadap 80 evaluasi kausal yang mencakup 21 kebijakan penetapan harga karbon.	Dari kebijakan yang ditelaah, setidaknya 17 menunjukkan pengurangan emisi yang signifikan, dengan estimasi berkisar antara 5–21%; setelah koreksi bias publikasi, estimasinya menjadi sekitar 4–15%. Temuan ini memberikan bukti bahwa kebijakan harga karbon dapat mencapai tujuan lingkungannya, meskipun efektivitasnya berbeda menurut desain dan konteks pelaksanaan.
18	Woerner *et al.* (2024)	How to Increase Public Support for Carbon Pricing with Revenue Recycling. Eksperimen terhadap sampel representatif penduduk Jerman.	Dividen karbon yang dibagikan dengan jumlah sama kepada setiap warga mendapat dukungan lebih besar daripada beberapa alternatif yang diuji, termasuk penggunaan penerimaan untuk anggaran umum. Temuan ini berbeda penekanannya dari sebagian hasil tinjauan yang mengunggulkan belanja hijau, sehingga menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat dapat bergantung pada desain kebijakan dan bentuk kompensasi yang dibandingkan.
19	Dugstad *et al.* (2024)	Carbon Pricing Acceptance—The Role of Revenue Recycling among Households and Companies in Norway. Kajian mengenai penerimaan pajak karbon pada rumah tangga dan perusahaan di Norwegia.	Penelitian membahas pentingnya rancangan penggunaan kembali penerimaan pajak bagi penerimaan kebijakan karbon oleh rumah tangga dan perusahaan. Temuan ini mendukung perlunya memperhitungkan dampak distribusi dan respons kelompok terdampak ketika merancang pajak lingkungan.
20	Pereda *et al.* (2024)	Equity-Driven Fiscal Policies: Taxing Ultra-Processed Products and Subsidizing Minimally Processed Foods. Pemodelan permintaan rumah tangga di Brasil menggunakan Almost Ideal Demand System.	Kombinasi pajak 20% atas produk ultra-proses dan subsidi 20% atas buah serta sayuran meningkatkan kualitas konsumsi, tetapi simulasi juga memperlihatkan kerugian kesejahteraan konsumen sekitar 0,32%. Penargetan subsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah berpotensi memperbaiki keadilan distribusi manfaat.
21	Mukhamedyarova *et al.* (2025)	The Influence of Public Audit Bodies on the Effectiveness of Local Budget Governance. Analisis indikator lintas negara dan studi kasus tata kelola anggaran lokal di Kazakhstan.	Lembaga audit publik dipandang penting dalam memperkuat disiplin fiskal, transparansi, dan tata kelola anggaran. Dampaknya sangat bergantung pada tindak lanjut atas temuan audit; audit tidak otomatis memperbaiki pengelolaan apabila rekomendasinya tidak diterapkan.
22	Lin dan Shi (2025)	Domestic Market Integration and Subsidies Provided by Local Government to Zombie Firms: Evidence from China's City-Level Data. Analisis data panel 297 kota di Tiongkok pada 2008–2020.	Subsidi yang ditujukan kepada perusahaan tidak efisien atau zombie firms meningkatkan segmentasi pasar antardaerah, mendorong distorsi alokasi sumber daya, dan dapat menghambat perusahaan yang lebih produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa subsidi yang tidak efektif bukan hanya membebani anggaran, tetapi juga mengganggu persaingan dan efisiensi pasar.

No.	Penulis dan tahun	Judul penelitian dan metode	Temuan utama yang relevan
23	Olarewaju (2026)	From Secrecy to Transparency: Can Publicly Accessible Digital Budgets Deliver Better Value?. Studi kasus Nigeria dan perbandingan inisiatif anggaran digital di Afrika.	Sistem anggaran digital yang dapat diakses dan dipantau publik berpotensi menekan korupsi serta memperkuat akuntabilitas. Akan tetapi, manfaatnya dibatasi oleh kapasitas teknis, lemahnya penegakan aturan, dan resistensi politik. Artinya, keterbukaan digital perlu disertai sistem pengawasan dan penegakan yang nyata.
24	Langkamau dan Airawaty (2026)	The Effect of Budget Transparency, Public Participation, and Internal Supervision on Regional Government Financial Accountability. Survei terhadap 50 responden di Kabupaten Flores Timur dan analisis regresi linear berganda.	Transparansi anggaran, partisipasi publik, dan pengawasan internal secara simultan berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas membutuhkan keterbukaan informasi sekaligus keterlibatan masyarakat dan fungsi pengawasan yang berjalan berkelanjutan.
25	Tambunan dan Kuncoro (2026)	Does Taxpayer Supervision Affect Compliance and Tax Revenue? Evidence from Indonesia. Analisis panel 259 Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia pada 2021–2023.	Permintaan klarifikasi data dan/atau informasi (P2DK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan serta penerimaan pajak, sedangkan penerbitan surat tagihan pajak (STP) hanya berpengaruh terhadap penerimaan. Penelitian merekomendasikan penguatan instrumen pengawasan yang terbukti efektif dan perbaikan tindak lanjut atas data perpajakan.

Berdasarkan penelaahan terhadap 25 artikel tersebut, terdapat tiga kecenderungan utama. Pertama, akuntabilitas fiskal tidak cukup dibangun melalui peraturan formal, tetapi memerlukan transparansi anggaran, pengawasan yang berfungsi, partisipasi publik, dan evaluasi terhadap hasil penggunaan dana. Temuan Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2022) serta Gootjes dan de Haan (2022) memperlihatkan pentingnya transparansi bagi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan fiskal. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Mukhamedyarova *et al.* (2025), Olarewaju (2026), dan Langkamau dan Airawaty (2026) yang menekankan bahwa audit, keterbukaan informasi, serta pengawasan internal dan publik perlu berjalan bersama agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Pada bidang penerimaan negara, Rosyid *et al.* (2024) dan Tambunan dan Kuncoro (2026) menambahkan bahwa digitalisasi serta pengawasan perpajakan dapat memperbaiki administrasi dan kepatuhan, meskipun efektivitasnya tetap ditentukan oleh kualitas penerapan dan tindak lanjut pengawasan.

Kedua, pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesejahteraan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan perubahan harga atau besarnya bantuan yang diberikan. Adachi dan Fabinger (2022) menekankan bahwa pembagian beban pajak bergantung pada penerusan pajak ke harga dan struktur persaingan pasar. Fan dan Zhang (2022) memperlihatkan bahwa subsidi konsumen dapat mendorong kenaikan harga oleh perusahaan sehingga sebagian manfaat subsidi beralih kepada produsen. Pada konteks subsidi listrik Vietnam dan subsidi energi Indonesia, Do dan Le (2023) serta Gobel *et al.* (2024) memperlihatkan bahwa subsidi berbasis harga dapat gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Hasil berbeda menurut jenis pasar dan tujuan kebijakan: subsidi dapat memperbesar surplus konsumen dan produsen, tetapi juga berpotensi menimbulkan distorsi, pemborosan fiskal, atau kerugian kesejahteraan apabila biaya sosialnya melebihi manfaat. Hal ini diperkuat oleh kajian insentif pajak hijau (Wang *et al.*, 2022), pajak dan subsidi pangan (Pereda *et al.*, 2024), dan subsidi bagi perusahaan tidak efisien (Lin & Shi, 2025) yang menekankan pentingnya desain kebijakan, sasaran penerima, dan respons perilaku pasar.

Ketiga, transparansi, pengawasan, dan evaluasi dibutuhkan untuk memastikan apakah manfaat suatu kebijakan sebanding dengan biaya fiskalnya. Liu dan Zhang (2023) menunjukkan bahwa pengurangan pajak yang besar dapat melemahkan keberlanjutan fiskal daerah ketika penerimaan menurun dan belanja sulit disesuaikan. Indrawati *et al.* (2024) menyoroti perlunya perbaikan pengumpulan penerimaan, peninjauan insentif pajak, dan reformasi subsidi energi di Indonesia. Pada kebijakan lingkungan, Wiskich (2024) menemukan bahwa pajak karbon unggul pada sebagian besar kalibrasi modelnya dan Döbbeling-Hildebrandt *et al.* (2024) menemukan pengurangan emisi yang signifikan pada sebagian besar kebijakan harga karbon yang dievaluasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain dan kondisi pelaksanaan. Maestre-Andrés *et al.* (2021), Mohammadzadeh Valencia *et al.* (2024), dan Woerner *et al.* (2024) memperlihatkan bahwa pemanfaatan penerimaan pajak memengaruhi dukungan masyarakat, meskipun pilihan penggunaan penerimaan yang paling didukung tidak selalu sama pada setiap studi.

This is an open access article under the CC–BY-SA licen

Dengan demikian, hasil penelitian sebelumnya relatif konsisten dalam mendukung evaluasi kebijakan berbasis bukti, tetapi berbeda dalam menilai instrumen yang paling tepat karena perbedaan tujuan, kelompok penerima, struktur pasar, dan konteks kelembagaan.

Artikel-artikel tersebut tidak seluruhnya mengukur surplus. Untuk memperjelas batas antara artikel yang menilai surplus atau kesejahteraan pasar secara langsung dan artikel yang terkait dengan tata kelola atau dampak kebijakan, 25 artikel dipetakan pada Tabel 2 berdasarkan fokus analisis yang dilaporkan pada Tabel 1.

Tabel 2. Pemetaan 25 Artikel Berdasarkan Fokus Analisis dan Kedekatan dengan Pengukuran Surplus

Kel.	Fokus analisis	Nomor artikel	Artikel	n
A	Menganalisis surplus atau kesejahteraan pasar secara eksplisit (analisis teoretis, simulasi, atau empiris)	4, 5, 8, 15, 20	Fan & Zhang (2022); Adachi & Fabinger (2022); Do & Le (2023); Ramani *et al.* (2024); Pereda *et al.* (2024)	5
B	Menilai dampak, efektivitas, distribusi manfaat, penerimaan publik, atau biaya fiskal kebijakan tanpa mengukur surplus	1, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22	Maestre-Andrés *et al.* (2021); Wang *et al.* (2022); Liu & Zhang (2023); Gobel *et al.* (2024); Indrawati *et al.* (2024); Wiskich (2024); Mohammadzadeh Valencia *et al.* (2024); Döbbeling-Hildebrandt *et al.* (2024); Woerner *et al.* (2024); Dugstad *et al.* (2024); Lin & Shi (2025)	11
C	Menelaah tata kelola fiskal: transparansi, pengawasan, audit, evaluasi, dan administrasi perpajakan	2, 3, 9, 13, 14, 21, 23, 24, 25	Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022); Gootjes & de Haan (2022); Nate *et al.* (2023); Demidova *et al.* (2024); Rosyid *et al.* (2024); Mukhamedyarova *et al.* (2025); Olarewaju (2026); Langkamau & Airawaty (2026); Tambunan & Kuncoro (2026)	9

Catatan: pengelompokan disusun penulis berdasarkan fokus analisis setiap artikel; nomor merujuk pada Tabel 2.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa hanya lima dari 25 artikel (20%) yang menganalisis surplus atau kesejahteraan pasar secara eksplisit (kelompok A). Sebelas artikel menilai dampak, distribusi, atau biaya fiskal kebijakan tanpa mengukur surplus (kelompok B), dan sembilan artikel membahas tata kelola fiskal tanpa menghubungkannya dengan perubahan surplus (kelompok C). Dengan demikian, hubungan antara akuntabilitas fiskal dan perubahan surplus konsumen serta produsen dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis lintas kelompok, bukan temuan yang diukur langsung dalam artikel yang ditelaah.

Secara keseluruhan, literatur tata kelola menjelaskan bagaimana kebijakan seharusnya dirancang, diawasi, dan dievaluasi, sedangkan literatur ekonomi menjelaskan konsekuensi kebijakan terhadap harga, produksi, konsumsi, surplus konsumen dan produsen, serta biaya pemerintah. Keduanya saling melengkapi dan menempatkan pengukuran manfaat ekonomi bersama beban fiskal sebagai dasar menilai keberhasilan kebijakan pajak dan subsidi.

Pembahasan

Akuntabilitas Fiskal dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pajak dan Subsidi

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal perlu dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan kewenangan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan belanja dengan kewajiban menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi keputusan tersebut. Dalam kebijakan pajak, akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan dasar pemungutan, transparansi insentif dan pengecualian, kualitas administrasi, serta efektivitas pengawasan kepatuhan. Dalam kebijakan subsidi, akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan sasaran penerima, dasar penetapan besaran bantuan, transparansi biaya anggaran, dan pembuktian bahwa dana yang digunakan menghasilkan manfaat sosial atau ekonomi sesuai tujuan kebijakan.

Pemahaman tersebut sejalan dengan kerangka akuntabilitas Bovens (2007) yang memuat tiga unsur, yaitu kewajiban pelaku memberikan informasi dan penjelasan, penilaian oleh suatu forum, dan konsekuensi atas penilaian itu. Pada literatur yang ditelaah, unsur pertama berkaitan dengan transparansi, unsur kedua dengan pengawasan, audit, dan partisipasi publik, dan unsur ketiga dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Temuan Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2022) memperlihatkan hubungan positif antara transparansi anggaran dan keberlanjutan keuangan pemerintah, dan temuan Gootjes dan de Haan (2022) memperjelas bahwa aturan fiskal tidak cukup efektif ketika transparansi rendah. Keduanya menunjukkan bahwa aturan atau mekanisme anggaran formal belum menjamin keberhasilan jika informasi mengenai

kebijakan, alokasi dana, dan hasil pelaksanaannya tidak tersedia secara memadai. Transparansi karena itu berfungsi sebagai prasyarat untuk menilai apakah sumber daya fiskal digunakan sesuai tujuan dan apakah keputusan pemerintah dapat diperiksa pihak yang berkepentingan.

Unsur ketiga tampaknya paling lemah dalam literatur yang ditelaah. Mukhamedyarova *et al.* (2025) dan Langkamau dan Airawaty (2026) menempatkan audit, pengawasan internal, keterbukaan anggaran, dan partisipasi publik sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, tetapi pengawasan baru menghasilkan perbaikan nyata jika ada tindak lanjut. Audit tanpa pelaksanaan rekomendasi berisiko hanya menjadi prosedur administratif, dan keterbukaan informasi tanpa penegakan aturan tidak cukup mencegah penyimpangan, sebagaimana ditunjukkan pada anggaran digital di Nigeria (Olarewaju, 2026). Temuan Langkamau dan Airawaty (2026) perlu dibaca hati-hati karena berasal dari survei terhadap 50 responden di satu kabupaten sehingga generalisasinya terbatas. Temuan Brunnschweiler *et al.* (2025) menambahkan bahwa informasi yang tersedia belum tentu dipahami masyarakat. Sistem akuntabilitas fiskal oleh sebab itu perlu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, audit, dan tindak lanjut hasil evaluasi dalam satu rangkaian.

Dalam pengelolaan pajak, Rosyid *et al.* (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak, sedangkan Tambunan dan Kuncoro (2026) memperlihatkan bahwa salah satu bentuk pengawasan, yaitu P2DK, berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Kedua temuan menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan penerimaan, tetapi juga dengan keandalan proses administrasi, pemanfaatan informasi, kualitas pengawasan, dan hasil yang dicapai. Digitalisasi tetap memerlukan perlindungan data dan penanganan kesenjangan akses agar proses perpajakan tidak menimbulkan hambatan baru bagi wajib pajak.

Pada kebijakan subsidi, prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menjelaskan pihak yang menerima manfaat dan alasan suatu sektor atau kelompok memperoleh dukungan. Gobel *et al.* (2024) menemukan bahwa subsidi energi berbasis harga di Indonesia dapat memberikan manfaat secara tidak proporsional kepada rumah tangga mampu, sedangkan sejumlah kelompok rentan menghadapi kesulitan akses. Temuan Lin dan Shi (2025) mengenai subsidi bagi perusahaan tidak efisien di Tiongkok juga menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang tidak tepat dapat menghambat integrasi pasar dan memperburuk alokasi sumber daya. Akuntabilitas pada subsidi dengan demikian tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau tersalurkannya bantuan, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran, tambahan manfaat yang dihasilkan, serta konsekuensi terhadap persaingan dan keberlanjutan fiskal.

Berdasarkan perbandingan tersebut, prinsip utama akuntabilitas fiskal dalam kebijakan pajak dan subsidi mencakup keterbukaan informasi, kejelasan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, pengawasan yang independen dan efektif, partisipasi publik, serta evaluasi berdasarkan hasil. Prinsip-prinsip ini tidak bekerja secara terpisah. Transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan, sedangkan evaluasi menunjukkan apakah kebijakan mencapai tujuannya. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar untuk memperbaiki, mempertahankan, atau menghentikan kebijakan yang tidak efektif.

Pengaruh Kebijakan Pajak dan Subsidi terhadap Harga, Perilaku Pasar, serta Distribusi Surplus Konsumen dan Produsen

Pajak dan subsidi memengaruhi kesejahteraan melalui perubahan harga, biaya produksi, jumlah barang yang diperdagangkan, serta keputusan konsumen dan produsen. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, perubahan pajak tidak selalu sepenuhnya ditanggung pihak yang secara formal berkewajiban membayar. Adachi dan Fabinger (2022) menjelaskan bahwa penerusan pajak ke harga dan pembagian beban antara konsumen dan produsen bergantung pada kondisi permintaan, biaya produksi, dan struktur persaingan. Kerangka dasarnya dikembangkan oleh Weyl dan Fabinger (2013), yang menunjukkan bahwa pada struktur pasar tertentu *pass-through* dapat melebihi 100%, yakni harga naik lebih besar daripada pajak. Penilaian dampak pajak karena itu perlu memperhatikan siapa yang akhirnya menanggung beban ekonomi, bukan hanya siapa yang diwajibkan membayar menurut peraturan.

Pada kebijakan subsidi, Fan dan Zhang (2022) menunjukkan bahwa bantuan kepada konsumen dapat diikuti kenaikan harga oleh perusahaan. Kondisi tersebut mengurangi manfaat yang diterima konsumen karena sebagian bantuan pemerintah berubah menjadi tambahan pendapatan bagi produsen. Peningkatan surplus konsumen dengan demikian tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan besaran subsidi. Dampaknya perlu dinilai melalui perbandingan perubahan harga yang dibayar pembeli, penerimaan bersih penjual, jumlah barang yang terjual, dan biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Temuan Do dan Le (2023) tentang subsidi listrik di Vietnam mendukung kesimpulan ini dari sisi

This is an open access article under the CC–BY-SA licen

distribusi: subsidi yang menjaga harga tetap rendah belum tentu efektif menjangkau kelompok miskin, terutama ketika struktur tarif tidak dirancang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan rumah tangga.

Temuan tersebut relevan dengan subsidi energi di Indonesia. Gobel *et al.* (2024) menemukan bahwa subsidi energi berbasis harga berpotensi memberi keuntungan lebih besar kepada kelompok mampu daripada kelompok miskin dan rentan, sehingga manfaat langsung berupa harga yang lebih rendah dinikmati secara tidak seimbang. Jika tujuan kebijakan adalah membantu kelompok dengan keterbatasan daya beli, subsidi berbasis penerima yang teridentifikasi secara tepat dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki distribusi manfaat. Perubahan desain subsidi tetap perlu memperhatikan kemampuan administrasi, kualitas data penerima, dan dampak penyesuaian harga terhadap rumah tangga rentan.

Wang *et al.* (2022) menambahkan bahwa dampak intervensi fiskal juga terlihat pada keputusan investasi dan inovasi perusahaan. Insentif pajak mendorong inovasi hijau melalui pengurangan kendala pembiayaan, sedangkan subsidi tunai tidak selalu menimbulkan tambahan manfaat yang sama. Lin dan Shi (2025) menunjukkan bahwa subsidi bagi perusahaan tidak efisien dapat menyebabkan distorsi alokasi sumber daya dan menghambat integrasi pasar. Kedua penelitian memperlihatkan bahwa subsidi atau insentif pajak dapat mendukung aktivitas ekonomi jika desainnya sesuai tujuan, tetapi dapat menurunkan efisiensi ketika manfaatnya tidak sebanding dengan biaya fiskal atau justru mempertahankan aktivitas yang kurang produktif.

Perbedaan hasil antarpenelitian juga ditemukan pada penggunaan pajak dan subsidi untuk tujuan lingkungan. Wiskich (2024) menyimpulkan bahwa pajak karbon unggul pada sebagian besar kalibrasi model, sementara subsidi riset atau produksi energi bersih tetap berperan pada kondisi tertentu. Ramani *et al.* (2024) menemukan bahwa kesejahteraan tertinggi dapat dicapai melalui pajak atau subsidi bergantung pada besarnya kerusakan lingkungan, dan meta-analisis Döbbeling-Hildebrandt *et al.* (2024) memperlihatkan pengurangan emisi yang signifikan pada sebagian besar skema harga karbon yang dievaluasi. Instrumen fiskal dengan demikian perlu dinilai berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, termasuk pengurangan eksternalitas lingkungan, bukan hanya dampak langsungnya terhadap harga atau surplus pasar.

Keseimbangan antara manfaat dan biaya terlihat pada kajian pajak produk ultra-proses dan subsidi pangan yang lebih sehat. Simulasi Pereda *et al.* (2024) memperlihatkan peningkatan kualitas konsumsi, tetapi juga kerugian kesejahteraan konsumen dalam model yang digunakan. Kebijakan yang menghasilkan manfaat sosial pada satu dimensi tetap dapat membebani rumah tangga pada dimensi lain. Kebijakan fiskal karena itu perlu dianalisis secara distributif, yakni dengan membandingkan dampaknya terhadap kelompok pendapatan yang berbeda dan mempertimbangkan apakah kompensasi diperlukan untuk mencegah beban yang tidak proporsional.

Secara konseptual, perubahan kesejahteraan akibat pajak atau subsidi dapat dilihat sebagai jumlah perubahan surplus konsumen, perubahan surplus produsen, dan perubahan penerimaan atau biaya bersih pemerintah. Pada pajak yang mengubah perilaku pasar, jumlah ketiganya bernilai negatif sebesar kerugian bobot mati (Harberger, 1964), sedangkan pada subsidi, peningkatan surplus konsumen dan produsen harus dibandingkan dengan biaya anggaran yang dikeluarkan. Perubahan surplus karena itu tidak boleh dinilai terpisah dari biaya fiskal, perubahan jumlah transaksi, dampak distribusi, dan eksternalitas. Penilaian kesejahteraan yang lebih luas daripada sekadar membandingkan harga sebelum dan sesudah kebijakan juga didukung oleh temuan lintas studi yang ditelaah.

Peran Transparansi, Pengawasan, dan Evaluasi dalam Menilai Efektivitas Kebijakan serta Biaya Fiskalnya

Transparansi, pengawasan, dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan fiskal sejalan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Transparansi membuat informasi mengenai penerimaan pajak, belanja subsidi, penerima manfaat, dan pelaksanaan program dapat diperiksa. Pengawasan berperan mengidentifikasi ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kelemahan pelaksanaan. Evaluasi kemudian membandingkan manfaat dengan biaya dan mengukur apakah kebijakan menghasilkan perbaikan yang diharapkan. Tanpa ketiga mekanisme tersebut, pemerintah berisiko mempertahankan program karena kebiasaan atau pertimbangan politik meskipun efektivitasnya belum terbukti.

Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2022) serta Gootjes dan de Haan (2022) memperlihatkan bahwa transparansi berkaitan dengan keberlanjutan keuangan dan efektivitas aturan fiskal. Nate *et al.* (2023) menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran dapat diukur melalui indikator tertentu sehingga perkembangan transparansi tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif; pada sektor pertahanan Ukraina, keterlambatan publikasi dan ketidakteraturan audit masih menjadi kendala. Olarewaju (2026)

menyoroti peluang sistem anggaran digital untuk memperluas akses informasi dan pemantauan publik. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan informasi saja belum cukup: kualitas informasi, kapasitas lembaga, independensi pengawasan, dan tindak lanjut atas temuan menjadi faktor penting bagi pertanggungjawaban yang efektif.

Dari sisi penerimaan pajak, Rosyid *et al.* (2024) dan Tambunan dan Kuncoro (2026) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi dan pengawasan dapat mendukung kepatuhan serta penerimaan negara, tetapi efektivitas instrumen pengawasan dapat berbeda. Sistem perpajakan perlu mengukur hasil dengan indikator yang dapat diverifikasi, seperti perubahan tingkat kepatuhan, penerimaan bersih, biaya administrasi, kualitas data, dan penyelesaian temuan pengawasan, agar keberhasilan tidak semata-mata dinilai dari meningkatnya jumlah pemeriksaan atau tersedianya sistem digital. Demidova *et al.* (2024) menambahkan bahwa evaluasi insentif pajak juga memerlukan pencatatan yang terstandar karena perbedaan definisi, cakupan, dan ketersediaan data menyulitkan perbandingan.

Dalam kebijakan subsidi dan insentif pajak, evaluasi perlu membandingkan manfaat yang benar-benar dihasilkan dengan biaya langsung maupun tidak langsung. Liu dan Zhang (2023) menunjukkan bahwa pengurangan pajak dapat menekan keberlanjutan fiskal ketika penurunan penerimaan berlangsung bersamaan dengan keterbatasan pengurangan belanja. Indrawati *et al.* (2024) menekankan bahwa peningkatan penerimaan dan perbaikan efisiensi belanja tetap penting bagi kondisi fiskal Indonesia. Kajian Lin dan Shi (2025) mengingatkan bahwa biaya kebijakan tidak hanya berupa pengeluaran pemerintah, tetapi juga mencakup terhambatnya persaingan, berkurangnya produktivitas, dan salah alokasi sumber daya. Evaluasi kebijakan karena itu harus mencakup konsekuensi fiskal sekaligus dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Perbedaan hasil mengenai penggunaan kembali penerimaan pajak karbon juga menunjukkan pentingnya evaluasi yang mempertimbangkan konteks. Maestre-Andrés *et al.* (2021) menemukan bahwa belanja proyek lingkungan serta kombinasi kompensasi dan pembiayaan lingkungan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat. Mohammadzadeh Valencia *et al.* (2024) menemukan bahwa penggunaan kembali penerimaan secara umum memperkuat dukungan, dengan belanja hijau sebagai pilihan yang berhubungan signifikan dengan peningkatan dukungan pada analisis meta-regresi. Sebaliknya, eksperimen Woerner *et al.* (2024) menunjukkan bahwa dividen karbon dengan jumlah seragam kepada warga memperoleh dukungan lebih besar daripada alternatif yang dibandingkan, dan Dugstad *et al.* (2024) menegaskan pentingnya rancangan penggunaan kembali penerimaan bagi penerimaan kebijakan oleh rumah tangga dan perusahaan di Norwegia. Perbedaan ini tidak perlu dipandang sebagai kontradiksi karena rancangan, populasi, dan kebijakan pembanding yang digunakan berbeda. Perbedaan tersebut justru menegaskan perlunya menguji alternatif penggunaan penerimaan pajak sesuai keadaan sosial dan tujuan kebijakan di setiap negara.

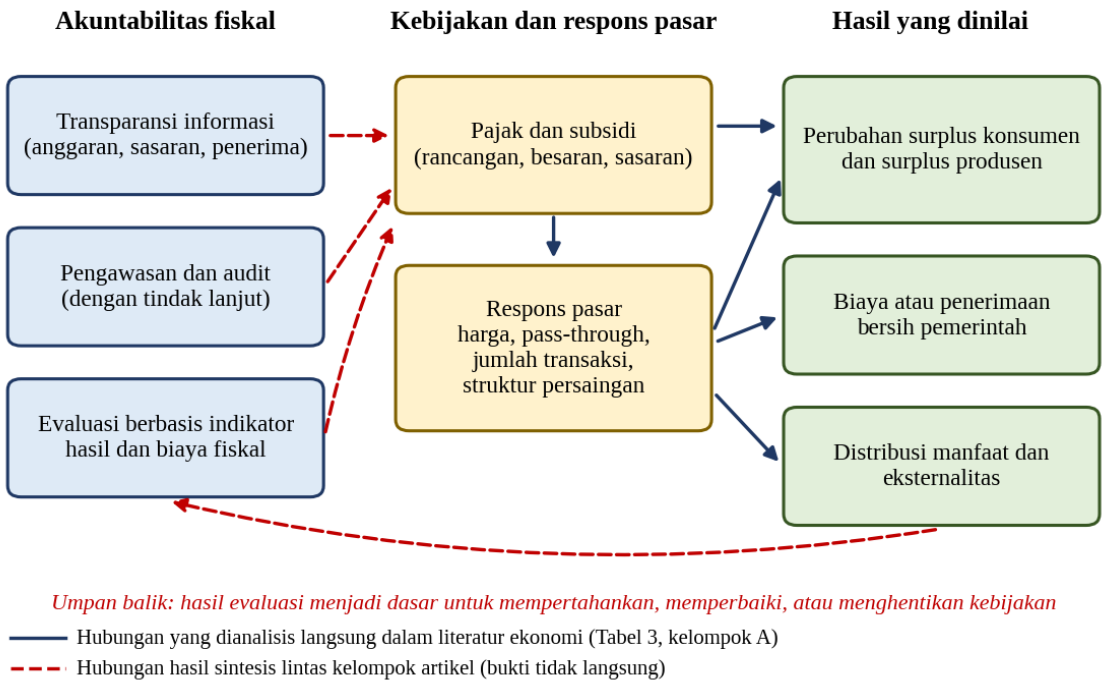
Transparansi, pengawasan, dan evaluasi dengan demikian berperan bukan hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga menguji apakah kebijakan fiskal menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Evaluasi yang memadai perlu mencatat setidaknya penerimaan dan belanja fiskal, perubahan harga, jumlah barang yang diperdagangkan, distribusi manfaat antar kelompok, perubahan surplus konsumen dan produsen apabila dapat diukur, serta dampak sosial dan lingkungan yang relevan.

Sintesis Konseptual dan Batas Bukti

Ketiga temuan di atas dapat diringkas dalam satu kerangka konseptual (Gambar 1). Akuntabilitas fiskal, melalui transparansi, pengawasan yang ditindaklanjuti, dan evaluasi berbasis indikator, memengaruhi cara kebijakan pajak dan subsidi dirancang, yakni besaran, sasaran, dan syarat penerimanya. Rancangan tersebut menentukan respons pasar berupa perubahan harga, *pass-through*, jumlah transaksi, dan struktur persaingan, yang selanjutnya menentukan perubahan surplus konsumen dan produsen, biaya atau penerimaan bersih pemerintah, serta distribusi manfaat dan eksternalitas. Hasil evaluasi kembali menjadi masukan bagi keputusan untuk mempertahankan, memperbaiki, atau menghentikan kebijakan.

This is an open access article under the CC–BY-SA licen

Gambar 1. Kerangka Sintesis Konseptual Akuntabilitas Fiskal, Respons Pasar, dan Perubahan Surplus



Sumber: sintesis penulis berdasarkan 25 artikel yang ditelaah (Tabel 2 dan Tabel 3).

Kerangka ini perlu dibaca dengan memperhatikan batas bukti. Garis lurus pada Gambar 1, yaitu hubungan antara kebijakan, respons pasar, dan perubahan surplus atau kesejahteraan, dianalisis secara langsung hanya oleh lima artikel kelompok A (Tabel 3). Garis putus-putus, yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap rancangan kebijakan dan umpan balik evaluasi, berasal dari sintesis temuan kelompok B dan C yang meneliti tata kelola, efektivitas, atau biaya fiskal tanpa mengukur surplus. Hubungan akhir antara kualitas akuntabilitas dan besarnya perubahan surplus konsumen dan produsen karena itu masih berupa proposisi konseptual yang memerlukan pengujian empiris, misalnya dengan membandingkan sektor atau daerah yang berbeda dalam tingkat transparansi dan ketepatan sasaran subsidinya.

Implikasi bagi Kebijakan Pajak dan Subsidi di Indonesia

Temuan penelitian ini memberi tiga implikasi utama bagi konteks Indonesia. Pertama, subsidi energi berbasis harga perlu dinilai berdasarkan siapa yang benar-benar menikmati manfaatnya. Gobel *et al.* (2024) merekomendasikan pergeseran menuju subsidi rumah tangga yang lebih langsung dan tepat sasaran, dan Indrawati *et al.* (2024) mencatat reformasi subsidi energi sebagai salah satu agenda fiskal pascapandemi. Reformasi tersebut memerlukan data penerima yang andal serta perlindungan bagi rumah tangga rentan yang terdampak penyesuaian harga.

Kedua, insentif dan pengecualian pajak perlu diperlakukan sebagai belanja yang dapat dievaluasi. Temuan Demidova *et al.* (2024) dan Indrawati *et al.* (2024) menunjukkan bahwa nilai dan hasil ekonomi insentif harus dicatat secara terstandar agar dapat dibandingkan antarwaktu dan antarkebijakan. Ketiga, pengawasan perpajakan perlu memprioritaskan instrumen yang terbukti efektif, seperti P2DK menurut Tambunan dan Kuncoro (2026), serta memastikan tindak lanjut atas hasilnya, sambil menjaga keamanan data dan akses yang merata dalam digitalisasi administrasi pajak (Rosyid *et al.*, 2024).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, pendekatan studi literatur membuat kesimpulan bergantung pada ketersediaan, kualitas, dan cakupan artikel yang ditelaah, bukan pada pengujian dengan data primer. Kedua, artikel berasal dari konteks negara, sektor, struktur pasar, dan metode yang berbeda sehingga hasilnya tidak selalu dapat dibandingkan atau digeneralisasikan. Ketiga, fokus pada artikel akses terbuka berpotensi mengecualikan publikasi relevan yang aksesnya terbatas. Keempat, hanya lima dari 25 artikel yang mengukur surplus atau kesejahteraan pasar secara eksplisit sehingga kaitan akuntabilitas dengan perubahan surplus merupakan hasil sintesis lintas tema, bukan bukti kausal yang seragam. Temuan penelitian ini karena itu dipahami sebagai pemetaan dan interpretasi kecenderungan literatur.

SIMPULAN

menghubungkan tujuan kebijakan, penggunaan dana publik, respons pasar, dan distribusi kesejahteraan dalam kebijakan pajak dan subsidi. Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menaikkan harga yang dibayar konsumen atau menekan keuntungan produsen bergantung pada *pass-through* dan struktur pasar. Subsidi dapat memperluas manfaat ekonomi, tetapi manfaatnya tidak selalu sampai kepada sasaran karena dipengaruhi penetapan harga, struktur pasar, dan ketepatan sasaran. Transparansi, pengawasan yang ditindaklanjuti, dan evaluasi berkala diperlukan agar manfaat kebijakan dapat diuji terhadap biaya fiskalnya. Karena hanya lima dari 25 artikel yang menganalisis surplus secara eksplisit, kaitan akuntabilitas dengan perubahan surplus konsumen dan produsen merupakan sintesis konseptual yang perlu diuji secara empiris.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka pada Gambar 1 dengan data empiris, seperti perubahan harga, volume produksi, tingkat konsumsi, penerimaan pajak, belanja subsidi, dan distribusi pendapatan, pada sektor tertentu seperti energi, pangan, dan transportasi dengan memperhatikan struktur pasar serta elastisitas permintaan dan penawaran.

Pemerintah direkomendasikan, pertama, menyediakan informasi biaya, sasaran, dan penerima pajak dan subsidi, termasuk insentif pajak, dalam format baku yang mudah diakses disertai audit independen yang tindak lanjutnya dipantau. Kedua, menyertai setiap kebijakan pajak dan subsidi yang baru atau diperpanjang dengan analisis insidensi dan distribusi manfaat yang membandingkan perubahan harga, surplus konsumen dan produsen (bila dapat diukur), serta biaya fiskal. Ketiga, menetapkan kriteria penerima dan indikator hasil sejak awal serta menggunakan hasil evaluasi untuk mempertahankan, memperbaiki, atau menghentikan program yang tidak mencapai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adachi, T., & Fabinger, M. (2022). Pass-through, welfare, and incidence under imperfect competition. *Journal of Public Economics, 211*, 104589. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104589

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). SAGE Publications.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Brunnschweiler, C., et al. (2025). When petroleum revenue transparency policy meets citizen engagement reality: Survey evidence from Indonesia. *Ecological Economics, 230*, 108529. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108529

Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2022). Budget transparency and financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34*(6), 210–234. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025

Demidova, S., et al. (2024). An assessment of the effectiveness and scale of tax expenditures to support investments and priority sectors in G20 countries. *Economies, 12*(6), 147. https://doi.org/10.3390/economies12060147

Do, L., & Le, T.-H. (2023). On the welfare effect of retail electricity subsidy in Vietnam. *Journal of Economics and Development, 25*(4), 286–301. https://doi.org/10.1108/JED-02-2023-0034

Döbbeling-Hildebrandt, N., et al. (2024). Systematic review and meta-analysis of ex-post evaluations on the effectiveness of carbon pricing. *Nature Communications, 15*(1), 4147. https://doi.org/10.1038/s41467-024-48512-w

Dugstad, A., Grimsrud, K. M., & Lindhjem, H. (2024). Carbon pricing acceptance – the role of revenue

This is an open access article under the CC–BY-SA licen

recycling among households and companies in Norway. *Climate Policy, 24*(10), 1365–1380. https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2401853

Fan, Y., & Zhang, G. (2022). The welfare effect of a consumer subsidy with price ceilings: The case of Chinese cell phones. *The RAND Journal of Economics, 53*(2), 429–449. https://doi.org/10.1111/1756-2171.12413

Gobel, R. K., et al. (2024). Equity and efficiency: An examination of Indonesia's energy subsidy policy and pathways to inclusive reform. *Sustainability, 16*(1), 407. https://doi.org/10.3390/su16010407

Gootjes, B., & de Haan, J. (2022). Do fiscal rules need budget transparency to be effective? *European Journal of Political Economy, 75*, 102210. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102210

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). *An introduction to systematic reviews* (2nd ed.). SAGE Publications.

Harberger, A. C. (1964). The measurement of waste. *The American Economic Review, 54*(3), 58–76.

Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2nd ed.). SAGE Publications.

Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 60*(1), 1–33. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967

Kopits, G., & Craig, J. (1998). *Transparency in government operations* (IMF Occasional Paper No. 158). International Monetary Fund.

Langkamau, L. A. A., & Airawaty, D. (2026). The effect of budget transparency, public participation, and internal supervision on regional government financial accountability. *Journal of Financial and Behavioural Accounting, 6*(1), 40–52. https://doi.org/10.33830/jfba.v6i1.14999.2026

Lin, X., & Shi, W. (2025). Domestic market integration and subsidies provided by local government to zombie firms: Evidence from China's city-level data. *Sustainability, 17*(9), 3796. https://doi.org/10.3390/su17093796

Liu, Q., & Zhang, X. (2023). A study on the effects of tax reduction policies on fiscal sustainability in China. *Sustainability, 15*(10), 7831. https://doi.org/10.3390/su15107831

Maestre-Andrés, S., et al. (2021). Carbon tax acceptability with information provision and mixed revenue uses. *Nature Communications, 12*(1), 7017. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27380-8

Mohammadzadeh Valencia, F., et al. (2024). Public support for carbon pricing policies and revenue recycling options: A systematic review and meta-analysis of the survey literature. *npj Climate Action, 3*(1), 74. https://doi.org/10.1038/s44168-024-00153-x

Mukhamedyarova, L., et al. (2025). The influence of public audit bodies on the effectiveness of local budget governance. *Administrative Sciences, 15*(12), 493. https://doi.org/10.3390/admsci15120493

Nate, S., Stavytskyy, A., & Kharlamova, G. (2023). Index of the openness and transparency of budgeting and financial management of the defence and security sector: Case of Ukraine. *Sustainability, 15*(7), 5617. https://doi.org/10.3390/su15075617

Olarewaju, T. (2026). From secrecy to transparency: Can publicly accessible digital budgets deliver better value? *Journal of Creating Value, 12*(1), 96–110. https://doi.org/10.1177/23949643261428217

Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pereda, P. C., et al. (2024). Equity-driven fiscal policies: Taxing ultra-processed products and subsidizing minimally processed foods. *Food Policy, 126*, 102667. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102667

Ramani, V., et al. (2024). Effectiveness of environmental regulations: Firm's decisions and welfare implications. *Journal of the Operational Research Society, 75*(12), 2443–2463. https://doi.org/10.1080/01605682.2024.2323664

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax laws in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law, 5*(3), 265–280. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242

Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.

Sumarno, T. B., Sihotang, P., & Prawiraatmadja, W. (2022). Exploring Indonesia's energy policy failures through the JUST framework. *Energy Policy*, *164*, 112914. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112914

Tambunan, F. H., & Kuncoro, A. R. (2026). Does taxpayer supervision affect compliance and tax revenue? Evidence from Indonesia. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, *11*(1), 134–147. https://doi.org/10.30871/jaat.v11i1.11218

Wang, C., et al. (2022). Tax incentives and green innovation—The mediating role of financing constraints and the moderating role of subsidies. *Frontiers in Environmental Science*, *10*, 1067534. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1067534

Weyl, E. G., & Fabinger, M. (2013). Pass-through as an economic tool: Principles of incidence under imperfect competition. *Journal of Political Economy*, *121*(3), 528–583. https://doi.org/10.1086/671766

Wiskich, A. (2024). A carbon tax versus clean subsidies: Optimal and suboptimal policies for the clean transition. *Energy Economics*, *132*, 107410. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107410

Woerner, A., et al. (2024). How to increase public support for carbon pricing with revenue recyclin g. *Nature Sustainability*, *7*(12), 1633–1641. https://doi.org/10.1038/s41893-024-01466-9

This is an open access article under the CC–BY-SA licen